



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN LIGUNG



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



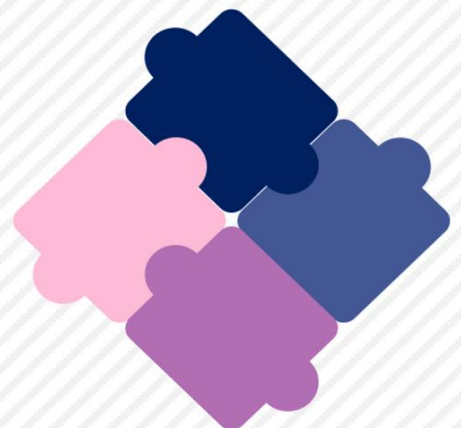
BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN & SARAN



LAMPIRAN

Daftar Isi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

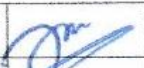



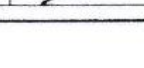
Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 28 Februari 2024
Camat Ligung



ABDUL GONI, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 198010152005011007

Diketahui oleh:

Sekretaris	
Kasi PPM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantibum	
Kasi Pemyanum	

BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang disusun dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Ligung setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Ligung Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Ligung

- a. Kedudukan, kecamatan adalah merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - Menerapkan dan menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
 - Melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

- Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan,
- Melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan serta
- Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan saran pelayanan;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

- Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

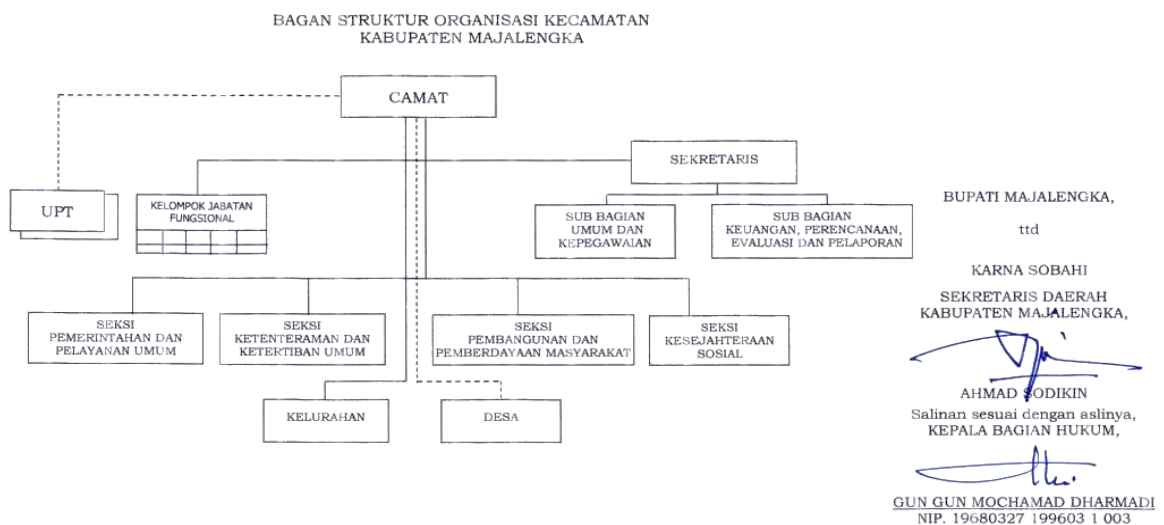
c. Bagan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka, organisasi kecamatan terdiri dari:

- Kepala Kecamatan yang disebut Camat;
- Sekretaris Kecamatan;
- Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kelompok Pelaksana

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Ligung

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 45 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan: 1 orang

Laki-laki : 15 orang

b. Eselon

Eselon II a : -

Eselon II b : -

Eselon III a: 1 orang

Eselon III b: 1 orang

Eselon IV a: 4 orang

Eselon IV b: 2 orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	3	9	4
PPPK	-	-	-	-

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi:

Jabatan Administrator : 2

Jabatan Pengawas : 6

Jabatan Fungsional : -

Jabatan Pelaksana : 8

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
		3			1	7	5	

INFOGRAFIK ASN KECAMATAN LIGUNG

Laki-laki

15 Orang



Perempuan

1 Orang



Eselon



II B -

1

III B 1

IVA 4

IVB 2

PNS			
I	II	III	IV
-	3	9	4
PPPK			
I	II	III	IV
-	-	-	-



Golongan

Jenis Jabatan



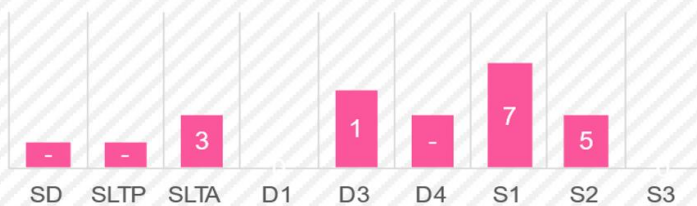
STRUKTURAL



PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan

1.3. Isu Strategis

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena dalam masyarakat atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan menjadi isu strategis Kecamatan Ligung, antara lain:

- (1) Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat;
- (2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (3) Kemandirian Desa;
- (4) Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- (5) Reformasi Birokrasi;
- (6) Kompetensi aparatur pemerintah kecamatan guna meningkatkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM);
- (7) Sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai baik sarana penunjang pelayanan maupun infrastruktur.

Pengembangan wilayah Aerocity BJJB dimana Master Plan Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat dengan konsep Aerotropolis ini dibangun di daerah persawahan dan pedesaan seluas 5.000 HA dengan 1.800 HA area bandara dan 3.200 HA area Aerocity. Bandara Kertajati ini lokasinya di utara jalan Tol Cipali dan barat berbatasan dengan sungai Cimanuk.

Konsep pengembangan kota bandara dengan pengembangan kota menjadi satu kesatuan dalam paket perencanaan pengembangan kota bandara, dapat menjadi pemicu pengembangan bisnis serta kawasan urban di sekitarnya yang nantinya diharapkan dapat memicu pertumbuhan klaster-klaster industri.

Aerotropolis sering juga disebut sebagai kawasan cepat tumbuh berbasis bandara atau “Airport-Centric Commercial Development” Kawasan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat global, sehingga dapat menyediakan lapangan

pekerjaan, kawasan perdagangan, pertemuan bisnis, hiburan dan destinasi pariwisata Begitu juga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, khususnya di kawasan Kabupaten Majalengka, akan tumbuh pesat pada masa yang akan datang. Ini tidak lepas dari hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat.

Kertajati Aerocity akan bertindak sebagai enabler pertumbuhan ekonomi timur Jawa Barat, terutama di **Ciayumajakuning** (Cirebon- Indramayu-Majalengka-Kuningan). Region Kertajati Aerocity akan berfungsi sebagai koridor industri dengan memiliki akses langsung ke Kabupaten Karawang dan Bandung Metropolitan Area, di mana ia akan mengembangkan kawasan **Ciayumajakuning** pada waktu yang sama. konektivitas tersebut akan didukung oleh beberapa jenis infrastruktur transportasi; Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) jalan tol yang menghubungkan Metro Bandung ke Kertajati, Cikapali (Cikampek-Palimanan) jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Karawang ke Kertajati dan Kertajati ke Cirebon, juga pembangunan kereta api dari Bandung ke Kertajati dan Kertajati ke Cirebon.

Kertajati Aerocity akan mempromosikan dan memperkuat penciptaan “mesin pertumbuhan” ekonomi di Majalengka. Beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, dan masyarakat akan mengambil keuntungan dan juga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat setempat, meningkatkan tingkat kesejahteraan, menciptakan iklim bisnis lokal, dan menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat, juga akan merangsang ekonomi lokal, memperkuat pengembangan industri, bisnis dan sektor pariwisata, mendorong budidaya sumber daya alam untuk mendukung nilai tambah tinggi industri, penghasilan pajak, dan banyak lainnya.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ligung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Ligung serta SK Tim Penyusunan LKIP (optional).

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tertuang dalam Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yaitu **Religius, Adil, Harmonis, dan Sejahtera** (RAHARJA), yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Religius**, seluruh aktivitas kehidupan masyarakat kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai.
- b. **Adil**, Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tertentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial.
- c. **Harmonis**, Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan.
- d. **Sejahtera**, Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

Sedangkan Misi Kabupaten Majalengka untuk pencapaian visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya.
2. Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensi masing-masing.
3. Meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka yang bahagia lahir dan batin.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ligung Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan kecamatan Ligung terdapat 6 program dengan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Ligung Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan di Kecamatan Ligung dan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perubahan Tujuan Kecamatan Ligung

Tujuan (2018-2023)	Tujuan (Hasil Review)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Perubahan Sasaran Kecamatan Ligung

Sasaran (2018-2023)	Sasaran (Hasil Review)
Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas
Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	
Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	

Perubahan Indikator Kinerja Kecamatan Ligung

Indikator Kinerja (2018-2023)	Indikator Kinerja (Hasil Review)
Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	
Capaian Sakip Perangkat Daerah	
Capaian SKM Perangkat Daerah	
Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	
Indeks Kepuasan Masyarakat	

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya;
- b. Pengelolaan sumberdaya;
- c. Intensifikasi pencegahan korupsi;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;

Sedangkan tujuan khusus dari penetapan Perjanjian Kinerja adalah seperti yang disebutkan di bawah ini, yaitu:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- c. Menciptakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja dasa revaluasi kinerja aparatur;
- e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi.

Berikut tabel perjanjian kinerja selama satu tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

Table

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik kecamatan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	
			Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	
		Peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100		
	Mewujudkan peran masyarakat berdasarkan sumberdaya yang dimiliki	Peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya		10	10	10	10	10	
		Penguatan daya saing masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	
			Persentase Warga yang Terlayani Oleh Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai						

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ligung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,62 Nilai

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Rencana Anggaran 2023

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.954.025.988	83,55
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.300.000	3,24
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.270.000	0,35
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.240.000	0,38
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82.825.000	2,82
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	284.205.000	9,66

Perubahan Rencana Anggaran 2023

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.457.908.481	83,55
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	95.300.000	3,24
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.270.000	0,35
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.240.000	0,38
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82.825.000	2,82
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	284.205.000	9,66

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 100% Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian lima Sasaran delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 8 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 0 indikator tidak mencapai 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	76,62	76,62	100%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1 IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	76,62	76,62	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ligung Tahun 2023 adalah 76,62

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	76,62	76	Kenaikan 0,62

Realisasi tahun 2023 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,62

Perbandingan capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan /Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	100%	

Capaian kinerja tahun 2023 dan 2022 sebesar 100%

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	76,62	76,62	100%

Target akhir Renstra sebesar 76,62 sedangkan realisasi sebesar 76,62.

Sehingga IKM Kecamatan Ligung bisa mencapai 100%

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan nilai Pemerintah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	76,62	83,26	6,64

5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**
- a. **Faktor Keberhasilan**, ditandai oleh beberapa keberhasilan dalam pelayanan umum antara lain:
- Pelayanan pembuatan atau pembaharuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebanyak 1700 kartu.
 - Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1200 kartu.
 - Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi proposal dan lain-lain sebanyak 58 surat.
 - Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi (Dispensasi) Nikah sebanyak 34 surat.
 - Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 97 surat.
 - Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Rame-rame sebanyak 75 surat
- b. **Upaya yang telah dilakukan**, yaitu dengan terus menyelaraskan kebutuhan karyawan agar bisa bekerja dengan lebih produktif, mengoptimalkan potensi karyawan untuk mendapat hak agar lebih produktif dan menyesuaikan diri dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
- c. **Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang** untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaian IKM Perangkat Daerah yaitu dengan membina dan mengembangkan potensi karyawan untuk bekerja lebih produktif dan menyesuaikan diri dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SAKIP, mengintegrasikan elemen perencanaan dan penilaian kinerja, meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan laporan tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja di Kecamatan Ligung.

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian • Kasubag KPEP 	2.457.908.481
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan dan pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Kesejahteraan Sosial dan • Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 	95.300.000
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi PPM 	10.725.000
4.	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Trantib 	11.240.000
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Kesejahteraan Sosial 	82.825.000
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi PPM, • Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 	284.205.000

7. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas, yaitu 4,10% atau sebesar Rp120.650.368 dari pagu anggaran Rp2.941.748.481 dengan realisasi 2.821.098.113

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	95,90



BAB 4

KESIMPULAN

SARAN-SARAN

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

a. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ligung Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). LKIP ini melaporkan mengenai akuntabilitas dalam kinerja dan keuangan yang telah diterima melalui DPA/DPPA serta dalam hal kapasitas Camat sebagai pejabat wilayah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat selama 1 (satu) Tahun.

Laporan ini merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good government/clean government*) serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan professional yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati periode Tahun 2018-2023 yaitu “**RAHARJA**” (Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera).

Keberhasilan pelaksanaan tugas Camat Ligung sangat ditentukan oleh adanya bantuan, partisipasi dan dukungan dari semua unsur; masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Ligung, dinas/instansi terkait serta stakeholder tingkat kabupaten sebagai penentuan arah kebijakan global Kabupaten Majalengka.

Untuk melaksanakan program/kegiatan, kecamatan Ligung mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.941.748.481 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 2.821.098.113 dengan prosentase sekitar 95,90% dan capaian kinerja 100%.

Kecamatan Ligung pada Tahun Anggaran 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Dan efisiensi sumber daya keuangan kecamatan Ligung pada tahun anggaran 2023 adalah 4,10% atau sebesar Rp120.650.368.

b. Saran

1. Setiap Kepala Sub Bagian PEP, baik di OPD maupun di Kecamatan agar diberikan staf pembantu/pelaksana ASN yang berkompeten (menguasai IT).
2. Bimbingan teknis penyusunan LKIP agar dilakukan dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya.
3. Pertemuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pejabat penanggungjawab LKIP lebih diintensifkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kecamatan Ligung tahun 2023 ini, semoga dapat menjadi gambaran/acuan bagi instansi dan stakeholder terkait dan menjadi nilai kebaikan bagi bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL GONI, S.H., M.H.**

Jabatan : Camat Ligung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



ABDUL GONI, S.H., M.H.
NIP. 19801015 200501 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN LIGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,62 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 2.457.908.481,00	APBD
2.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 95.300.000,00	APBD
3.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 10.270.000,00	APBD
4.	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 11.240.000,00	APBD
5.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 82.825.000,00	APBD
6.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 284.205.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.941.748.481,00	



Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Majalengka, November 2023
Cama, Ligung,
ABDUL GONI, S.H., M.H.
19801015 200501 1 007

Lampiran 3 Bukti sebar LKIP 2023

BUKTI SEBAR LKIP 2023



KASI TRANTIBUM



KASI KESOS



KASI PEMYANUM



KASI PPM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN LIGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARU
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,62 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 2.457.908.481,00	APBD
2.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 95.300.000,00	APBD
3.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 10.270.000,00	APBD
4.	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 11.240.000,00	APBD
5.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 82.825.000,00	APBD
6.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 284.205.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.941.748.481,00	



Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBANI, M.M.Pd.



Majalengka, November 2023

Kecamatan Ligung,

ABDUL GONI, S.H., M.H.

NIK 19801015 200501 1 007

Lampiran 2 Cascadin

Lampiran 3 Bukti sebar LKIP 2023

BUKTI SEBAR LKIP 2023



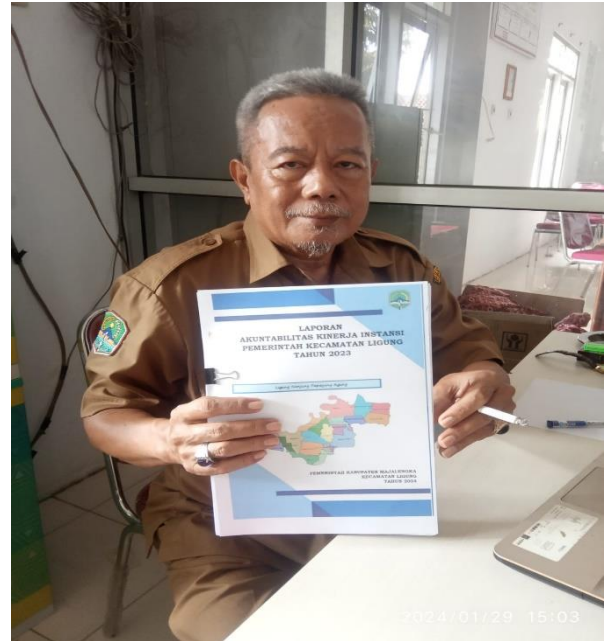
KASI TRANTIBUM



KASI KESOS



KASI PEMYANUM



KASI PPM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN LIGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,62 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 2.457.908.481,00	APBD
2. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 95.300.000,00	APBD
3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 10.270.000,00	APBD
4. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 11.240.000,00	APBD
5. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 82.825.000,00	APBD
6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 284.205.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 2.941.748.481,00	


 Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
 Camat Ligung,

ABDUL GONI, S.H., M.H.
 NRP. 19801015 200501 1 007

Lampiran 2 Cascadin

Lampiran 3 Bukti sebar LKIP 2023

BUKTI SEBAR LKIP 2023



KASI TRANTIBUM



KASI KESOS



KASI PEMYANUM



KASI PPM

CASCADING KECAMATAN TAHUN 2023

Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Indeks Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme
 Persentase kelurahan/desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN
 CAMAT
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesos
 2. Pelayanan administratif bidang kesejahteraan sosial sesuai standar
 3. Pelayanan administratif bidang pemerintahan sesuai standar
 4. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan
 1. Persentase kelurahan/desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang kesos
 2. Persentase permohonan administratif bidang kesejahteraan sosial yang terlayani sesuai standar
 3. Persentase permohonan administratif bidang pemerintahan yang terlayani sesuai standar
 4. Persentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan
 CAMAT

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN
 Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya Aktif Mengikuti PHBI/PHBN
 CAMAT
 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat tentang kesejahteraan sosial
 Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang kesejahteraan sosial
 CAMAT
 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan

Persentase permohonan administratif bidang kesos yang terlayani tepat waktu
 Persentase permohonan administratif bidang kesos yang terlayani
 CAMAT
 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak
 Persentase peningkatan pembayaran pajak PBB
 CAMAT
 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Meningkatny Kualitas data dan informasi kecamatan
 Presentase data dan informasi kecamatan yang sesuai standar
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Ikutsertanya masyarakat dalam kegiatan PHBN
 Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBN
Kasi Kesejahteraan Sosial
 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan republik Indonesia
Rp 35.660.000

Terbinanya kader PKK kecamatan tentang administrasi PKK
 Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK
Kasi Kesejahteraan Sosial
 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
Rp 29.955.000

Terlayaninya Permohonan administrasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial
 Persentase permohonan administratif bidang kesos yang terlayani
Kasi Kesejahteraan Sosial
 Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Rp 4.620.000

Terlaksananya monitoring PBB
 Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan monev PBB
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
Rp 10.725.000

Tersusunnya profil kecamatan
 Jumlah profil kecamatan
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Rp 0

Ikutsertanya masyarakat dalam kegiatan PHBI
 Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBN
Kasi Kesejahteraan Sosial
 Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan ntarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Rp 47.165.000

Terpantaunya lansia yang terlantar
 Jumlah Lansia yang Terpantau
Kasi Kesejahteraan Sosial
 Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Rp 50.000.000

Terlayaninya permohonan administrasi pelayanan bidang pemerintahan
 Persentase permohonan administrative bidang pemerintahan yang terlayani
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Rp 0.....

CASCADING KECAMATAN TAHUN 2023

Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Indeks Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Berkurangnya gangguan trantibum
Persentase Penurunan gangguan trantibum
CAMAT
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Meningkatnya Partisipasi Linmas dalam menjaga ketertiban umum
2. Meningkatnya kualitas penanganan gangguan tantribum
3. Meningkatnya kualitas pencegahan gangguan tantribum
4. Meningkatnya kualitas pengawasan tantribum
1. Persentase Linmas yang aktif
2. Persentase kasus tantribum yang ditangani
3. Persentase potensi gangguan tantribum yang terdeteksi
4. Persentase potensi gangguan tantribum yang terawasi
CAMAT
Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

1. Terpantaunya potensi HTAG
2. Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG
3. Terlaporkannya kasus pelanggaran Perda, Perkada & gangguan trantibum ke Satpol PP
1. Jumlah potensi HTAG yang terpantau melalui patroli
2. Jumlah dokumen kesepakatan mengatasi HTAG
3. Jumlah Pelanggaran Perda, Perkada dan gangguan trantibum yang dilaporkan
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Rp 11.240.000

Terpantaunya potensi gangguan tantribum
Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Rp 0

Meningkatnya kinerja kelurahan/desa
Persentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi
CAMAT
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa
Persentase kelurahan/desa yang dibina
CAMAT
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Terbinanya perangkat desa tentang pemerintahan
Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Rp 11.625.000

Terpilihnya kepala desa
Jumlah kepala desa yang terpilih
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Rp 254.055.000

Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang
Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Rp 18.525.000

Terbinanya lembaga kemasyarakatan & kepemudaan
Jumlah pembinaan lembaga masyarakat dan kepemudaan
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Rp 0

Terbinanya desa melalui lomba desa
Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Rp 0

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat
Persentase kelurahan/desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan Bidang pemberdayaan masyarakat
CAMAT
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat terkait Pemberdayaan masyarakat
Persentase peningkatan masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan masyarakat
CAMAT
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Terbinanya desa tentang potensi unggulan desa
Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa
Kasi Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Rp 0

Terbinanya desa tentang UMKM desa
Jumlah desa yang terbina UMKM
Kasi Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Rp 10.270.000

CASCADING KECAMATAN TAHUN 2023

Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
Indeks Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan
Nilai SAKIP PD
CAMAT
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan
Sekretaris Kecamatan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun
Kasubbag Keuangan dan PEP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp 1.520.000

Tersusunnya Dokumen RKA SKPD
Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun
Kasubbag Keuangan dan PEP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
Rp 2.491.000

Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA
Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun
Kasubbag Keuangan dan PEP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
Rp 2.492.000

Tersusunnya DPA
Jumlah DPA yang tersusun
Kasubbag Keuangan dan PEP
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA
Rp 2.440.000

Tersusunnya Perubahan DPA
Jumlah DPA yang tersusun
Kasubbag Keuangan dan PEP
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA
Rp 2.440.000

Tersusunnya LKIP
Jumlah LKIP yang tersusun
Kasubbag Keuangan dan PEP
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 1.494.000

Tersusunnya LKPJ
Jumlah LKPJ yang Tersusun
Kasubbag Keuangan dan PEP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rp 1.132.000

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu
1. Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu
2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu
3. Persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya
4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
5. Persentase aset yang tercatat
Sekretaris Kecamatan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdistribusinya gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang terdistribusigaji dan tunjangan
Kasubbag Keuangan dan PEP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rp 2.149.830.681

Tersusunnya Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Keuangan
Kasubbag Keuangan dan PEP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Rp 3.497.800

Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan
1. Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D
2. Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya
Kasubbag Keuangan dan PEP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Rp 1.660.000

CASCADING KECAMATAN TAHUN 2023

Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Indeks Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

Nilai SAKIP PD

CAMAT

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota

<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan</p> <p>Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>Kegiatan</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan</p> <p>Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>Kegiatan</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan</p> <p>Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan</p> <p>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan</p> <p>Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan, pelayanan administrasi surat menyurat</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan</p> <p>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</p>
<p>Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian</p> <p>Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Rp 0</p>	<p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p>	<p>Tersedianya barang habis pakai</p> <p>Jumlah barang habis pakai yang tersedia</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Rp 23.490.000</p>	<p>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Rp 0</p>	<p>Tersedianya layanan telepon, internet, air dan listrik</p> <p>Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon, internet, air dan listrik</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik</p> <p>Rp 59.400.000</p>	<p>Terpeliharanya kendaraan dinas</p> <p>Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Rp 15.000.000</p>
<p>Tersedianya alat komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor</p> <p>Jumlah alat listrik yang tersedia</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor</p> <p>Rp 0</p>	<p>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Rp 0</p>	<p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Rp 45.000.000</p>	<p>Tertanganinya permohonan data dan informasi, administrasi, jasa keamanan dan kebersihan kantor</p> <p>Jumlah unit kerja yang terlayani jasa data informasi, administrasi, jasa keamanan dan kebersihan kantor</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Rp 79.092.000</p>	<p>Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya</p> <p>Jumlah peralatan yang terpelihara dengan baik</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Rp 11.630.000</p>	
<p>Terlaksananya Rakor</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Rp 7.500.000</p>	<p>Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Rp 15.000.000</p>	<p>Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah waktu tersedianya bahan bacaan</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Rp 12.999.000</p>	<p>Terpeliharanya sarana dan prasarana</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara</p> <p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Rp 19.800.000</p>		

Lampiran 3 Bukti sebar LKIP 2023

BUKTI SEBAR LKIP 2023



KASI TRANTIBUM



KASI KESOS



KASI PEMYANUM



KASI PPM